

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepemimpinan adalah salah satu medan gumul Gereja. Gereja mesti secara serius mempersiapkan para pelayannya untuk memahami dan menghidupi apa dan bagaimana Kepemimpinan itu. Tidak dapat disangkal bahwa pemimpin memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan sebuah organisasi, baik organisasi sekuler maupun lembaga keagamaan. Jika pucuk pemimpin berlaku baik, jujur, dan tidak korup, maka kita dapat memastikan bahwa organisasi tersebut akan berjalan dengan baik. Demikian sebaliknya, jika pemimpin korup dan berlaku tidak adil, maka organisasi tersebut tidak akan bertahan lama dan tidak akan mencapai tujuannya.

Dalam menjalankan roda organisasi, ada berbagai macam bentuk dan model Kepemimpinan yang dipilih. Ada bentuk Kepemimpinan demokrasi, seperti yang diterapkan di Amerika Serikat, Indonesia, dan banyak negara lainnya. Presiden sebagai kepala negara dipilih dari dan oleh rakyat. Ada pula yang berbentuk kerajaan, seperti Arab Saudi. Pemerintahannya menggunakan sistem dinasti, atau Kepemimpinan

berdasarkan keturunan. Ada juga bentuk Kepemimpinan yang berbentuk diktator, seperti Korea Utara.

Dalam berbagai organisasi, ada pula Kepemimpinan kolegal-kolektif yang menggunakan Kepemimpinan oleh beberapa orang. Ada ketua umum, ada sekretaris umum, ada wakil-wakil dengan posisi dan tugas masing-masing. Hubungan antara para pemimpin ini diatur oleh aturan yang sudah disepakati bersama. Para pemimpin ini disebut pengurus yang membawahi wilayah tertentu dan dipilih dari anggota organisasi yang dianggap layak untuk itu.

Sebagai sebuah organisasi, Gereja Toraja menjalankan roda organisasinya dengan memakai Kepemimpinan secara kolektif-kolegal. Para pemimpinnya merupakan pejabat Gerejawi yang dipilih dalam sebuah persidangan yang disebut Sidang Sinode Am (SSA) Gereja Toraja. Sidang yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali ini dihadiri oleh para utusan dari masing-masing klasis. Mereka juga mengevaluasi program sebelumnya dan merencanakan program yang akan datang. Mengenai tim Kepemimpinan, mereka memilih para pengurus untuk melaksanakan program yang disepakati baik dalam SSA maupun dalam rapat-rapat kerja.

W.I.M Poli mengatakan bahwa Kepemimpinan adalah sebuah proses “untuk menjadi” bukan hanya sebuah hasil.¹ Penulis sependapat dengan pandangan ini. Dalam realitasnya, kita hanya melihat hasil dari seorang pemimpin tanpa melihat apa yang melatarbelakangi seorang pemimpin sehingga dapat berhasil dalam kepemimpinannya.

Menurut penulis, banyak orang berupaya mencontoh apa yang menjadi hasil dari Kepemimpinan, bukan dari proses pergulatan seorang pemimpin sehingga hal itu dapat terwujud. Penulis tidak menganggap bahwa hasil dari Kepemimpinan itu tidak penting, akan tetapi kalau proses “untuk menjadi” pemimpin sudah berjalan dengan baik maka hasil dari kepemimpinan itu akan berbanding lurus dengan proses.

Dalam berbagai kesempatan, penulis melihat pergumulan yang terjadi di dalam jemaat. Misalnya, proses aktualisasi pemimpin dalam membangun kepercayaan dan penghargaan antara seorang pemimpin dengan anggota komunitasnya belum maksimal. Akibatnya, Kepemimpinan menjadi otoriter. Penulis kerap kali mendengar ungkapan yang mengatakan bahwa, “Apa mo na pokada ketua yamo tu la dadi, atau apa mo napokada Pimpinan Majelis Gereja yamo tu la dadi, tae na sah te pertemuan/Rapat sabah tae na rampo ketua.” Artinya apa yang dikatakan

¹ Poli,W.I.M. *Kepemimpinan Strategis*, 2016, 4.

oleh ketua itulah yang akan kita lakukan atau apa yang dikatakan oleh pimpinan majelis Gereja itulah yang akan terjadi, pertemuan/Rapat ini tidak sah karena Ketua tidak hadir.

Menurut penulis, Kepemimpinan semacam ini tidak boleh diberlakukan di dalam Gereja. Sebab, jika Kepemimpinan tersebut terjadi, maka visi-misi sebuah Gereja tidak akan terwujud. Pemimpin yang baik mampu menyatukan gerak seluruh stakeholder dalam Gereja untuk mencapai visi misinya. Pemimpin mestinya mampu berjalan bersama. Menurut penulis, hal ini sesuai dengan bentuk Pemerintah Gereja yang bercorak Presibiterial Sinodal.

Dalam konteks Gereja Toraja, Presbiterial Sinodal diatur dalam Tata Gereja Toraja Pasal 8 ayat 12², menegaskan bahwa bentuk Gereja Toraja adalah Presbiterial Sinodal dan memori penjelasannya menjelaskan bahwa bentuk Presbiterial Sinodal merupakan pengaturan tata hidup dan pelayanan Gereja yang dilaksanakan oleh presbiteroi (pendeta, penatua, dan diaken) dalam suatu jemaat dengan keterikatan dan ketaatan kepada

² BPS Gereja Toraja, *Tata Gereja Toraja* (Rantepao: PT Sulo, 2017), 3.

kebersamaan dengan para presbiterioi dalam lingkup yang lebih luas (klasis, wilayah dan sinode).³

Penulis setuju pada bentuk pemerintahan Presbiterial Sinodal. Karena, menurut penulis, bentuk pemerintahan inilah yang paling aspiratif dan demokratis. Kepemimpinan ini memasang telinga pada aspirasi dan harapan jemaat untuk berjalan bersama dalam pelayanan. Secara formal, bentuk pemerintahan Presbiterial Sinodal telah dijalankan oleh Gereja Toraja. Hal itu tampak dari mekanisme persidangannya. Sebelum SSA, semua usul harus melalui mekanisme persidangan dalam lingkup (Tata Gereja Toraja menggunakan kata Lingkup bukan tingkat. Hal ini di pakai oleh Gereja Toraja untuk menghindari asumsi Hierarki struktural dalam Gereja. Kata lingkup menekankan pada tanggung jawab Pelayanan) yang paling kecil. Usul jemaat ke sidang klasis ditetapkan dalam sidang jemaat, kemudian usul dibawah ke Sidang Sinode Wilayah (SSW) dan setiap utusan SSA harus ditetapkan dalam persidangan klasis. Semua usul dalam SSA dianggap menjadi representasi dari seluruh jemaat. Jika usul itu menjadi keputusan, maka keputusan tersebut akan menjadi tanggung jawab bersama dalam Gereja Toraja. Karena itu, rapat kerja dari lingkup yang paling luas (sinode) sampai ke lingkup paling

³ Anggui, A.J. ed., *Directory Gereja Toraja* (Rantepao: BPS Gereja Toraja, 2011), 22.

kecil (jemaat) akan membahas program dari keputusan-keputusan Sidang Sinode Am.

Tata Gereja Pasal 8 mengatakan bahwa Presbiterial Sinodal adalah tata hidup dan pelayanan Gereja Toraja⁴, sejatinya ketika kita berbicara tentang Presbiterial Sinodal kita tidak hanya pada sebuah mekanisme aturan saja. tetap lebih jauh dari itu bahwa ketika kita berbicara Presbiterial Sinodal maka kita berbicara tentang cara menyeluruh tatanan pelayanan dalam Gereja Toraja, termasuk Kepemimpinan.

Menurut Koeffeman, Kepemimpinan Presbiterial Sinodal merupakan Kepemimpinan representatif dari para perwakilan penilik Gereja⁵ Lebih jauh, Koeffeman mengatakan bahwa Kepemimpinan representatif merupakan Kepemimpinan yang mengakomodir usul-usul dari para pemangku jabatan Gerejawi “yang paling rendah.”⁶ Penulis setuju terhadap pandangan Koeffeman ini, sebab para pemangku jabatan Gerejawi selalu dilibatkan dalam mengambil keputusan-keputusan yang lebih luas. Keterlibatan para pemangku jabatan Gerejawi dengan berbagai latar belakang profesi, potensi, dan pengalaman akan meningkatkan

⁴ Badan Pekerja Sinode, *Tata Gereja Toraja*, 18.

⁵ Koffeman Leo J, *In Order to Serve: Church Polity in Ecumenical Contexts* (Zurich: LIT Verlag Münster, 2014), 55.

⁶ Koffeman, 57.

kualitas keputusan. Sebagai objek penelitian, Wilayah 2 adalah Wilayah Pelayanan yang mempunyai karakteristik yang unik dari Wilayah lain di Gereja Toraja. Salah satu karakter yang unik di Gereja pedesaan di Wilayah 2 Rantepao itu adalah seorang Pemimpin adat (Parengnge, Ambe tondok) merasa Gereja adalah bagian dari wilayah pemerintahannya sehingga dalam kenyataannya terkadang seorang pemimpin adat otoriter dalam Mekanisme Keputusan dalam Gereja. Istilah yang muncul dari kenyataan ini adalah tidak penting apa yang di katakan, tetapi siapa yang mengatakan. Tentu ini berlawanan dengan sistem Presbiterial Sinodal yang menekankan keputusan yang diambil secara bersama yang demokratis.

Berdasarkan hal diatas, maka Penulis akan meneliti sejauh mana implikasi dan pengaruh Sistem Pemerintahan Presbiterial Sinodal pada proses Mekanisme Keputusan di Lingkup Jemaat, Klasis dan Wilayah. Dan sejauh mana Sistem ini berpengaruh pada pola Kepemimpinan di Wilayah 2 Rantepao. Tentu sistem ini beririsan dengan Budaya Toraja terutama budaya makombongan dan model kepemimpinan Ketorajaan. oleh karena itu penulis juga akan melihat Pengaruh Budaya Toraja terhadap proses Mekanisme Keputusan dan Kepemimpinan dalam jemaat.

Dalam tesisnya, Musa Salusu membahas Presbiterial Sinodal, sebuah kajian Teologis struktural kelembagaan Gereja Toraja. Salusu menekankan tentang sistem Presbiterial Sinodal yang berdampak pada penguatan kelembagaan Gereja Toraja. Penguatan yang dimaksud adalah sistem penatalayanan dalam Gereja Toraja kuat karena sistem Presbiterial yang dianut.⁷ Sedangkan penulis akan mengkaji Presbiterial Sinodal dari sisi implementasi dan Pengaruh Presbiterial Sinodal terhadap Mekanisme Keputusan dan Model Kepemimpinan Gereja Toraja di Wilayah 2 Rantepao. Hipotesis penulis bahwa Sistem Presbiterial Sinodal ini menjadi sintesa antara kepemimpinan Gereja dan Kepemimpinan Toraja dan Penguat terhadap mekanisme Keputusan. Inilah kebaruan yang Penulis tawarkan dalam proposal tesis ini.

B. Batasan Masalah

Agar tulisan ini dapat terarah dengan baik dan mencapai maksud serta sasarannya maka penulis memfokuskan masalah dalam penelitian ini tentang apa Hakikat Kepemimpinan Presbiterial Sinodal, Mengapa bentuk Presbiterial Sinodal dianut Gereja Toraja serta bagaimana implikasi dan Pengaruh sistem Presbiterial Sinodal terhadap Mekanisme

⁷ Salusu Musa, "Presbiterial Sinodal: sebuah kajian Struktural Kelembagaan Gereja Toraja" (Makassar, STT Intim, 1988), 78.

Keputusan dan model Kepemimpinan di Wilayah 2 Rantepao dalam konteks Budaya Toraja.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perlu pemetaan masalah dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan berikut;

1. Apa hakikat Presbiterial Sinodal dalam hubungannya dengan Mekanime Keputusan dan Kepemimpinan ?
2. Mengapa Model Presbiterial Sinodal dianut oleh Gereja Toraja dalam perjumpaannya dengan konteks Lokal ?
3. Bagaimana implikasi dari sistem Presbiterial Sinodal terhadap Mekanisme Keputusan dan Model Kepemimpinan di Gereja Toraja Wilayah 2 Rantepao dalam perjumpaannya dengan Budaya dan Masyarakat Toraja ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan Apa hakikat Presbiterial Sinodal pada Mekanisme Keputusan dan model Kepemimpinan ?

2. Untuk mengetahui mengapa bentuk Presbiterial Sinodal dianut oleh Gereja Toraja dalam perjumpaan konteks Budaya Toraja di Wilayah 2 rantepao ?

3. Untuk menganalisa Bagaimana bentuk Presbiterial Sinodal memengaruhi mekanisme keputusan dan model Kepimpinan dalam konteks Budaya Toraja.

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi para akademisi secara umum dan secara khusus bagi mahasiswa Kepemimpinan kristen untuk pengembangan ilmu Kepemimpinan kristen pada masa kini dan yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

Salah satu gumulan yang terjadi diwilayah 2 Rantepao adalah soal Kepemimpinan dalam jemaat. Kepemimpinan yang terkadang tidak lagi berdasar mayoritas keputusan jemaat, tetapi pada apa yang dikatakan oleh orang yang berpengaruh pada dalam jemaat tersebut. Oleh karena itu Penelitian ini diharapkan

dapat bermanfaat bagi Gereja Toraja dalam menjawab pergumulan di atas.

Penulis juga berharap hasil penelitian ini juga menjadi materi kepada Badan Pekerja Sinode Wilayah 2 Rantepao dan Badan Pekerja Klasis se-wilayah 2 Rantepao dalam membuat program yang sistematis dan terencana dalam membentuk pemimpin khususnya Majelis Gereja Toraja di Wilayah 2 Rantepao.

F. Metode Penelitian

Agar mendapatkan data data yang relevan terkait Presbiterial Sinodal yang berkembang di Gereja Toraja, Kepemimpinan dalam konteks Budaya Toraja di Wilayah 2 Rantepao maka penulis akan menempuh penelitian kualitatif.